

Dharma Yanti

DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP KONDISI MAKRO EKONOMI DAN TARGET PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA SAMARINDA

*(The Impact Of The Covid-19 Pandemic Outbreak On The Macroeconomic
Conditions In Samarinda City and Its Effect On Development Planning Targets)*

Dharma Yanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Jl. H.A.M. Rifaddin Loa Janan Iilir Samarinda, Kalimantan Timur
Email : dhyanti88.dy@uinsi.ac.id

Diterima : 27 Juli 2022; Direvisi : 14 November 2022; Disetujui : 02 Desember 2022

ABSTRACT

This research aims to determine the impact of the Covid-19 pandemic on the macroeconomic conditions of Samarinda City and its effect on development planning targets. The Covid-19 pandemic has had an impact on the decline in economic and social (macroeconomic) performance in Samarinda City. Where the first year of the pandemic the economic growth rate of Samarinda City experienced a contraction, but the second year was able to show improvement. This is also similar to the inflation condition of Samarinda City, which reached its lowest point at the beginning of the pandemic year, which indicated a decline in people's purchasing power, but showed an increase in a stable level in the second year of the pandemic. However, the pandemic has had a fairly severe impact on increasing poverty and unemployment in the city of Samarinda. The factor of termination of employment and the decline in people's income are the main factors. Communities affected by the pandemic must be a priority for the city government to be assisted and raised in life through appropriate work programs and become a priority. In terms of regional medium-term development planning (as seen from the 2016-2021 RPJMD of Samarinda City), the pandemic has caused several development targets not to be achieved in 2020 and 2021, such as the rate of economic growth, inflation, poverty rate and open unemployment rate. Meanwhile, the achievement of the Human Development Index (HDI) indicator was able to exceed the set target.

Keywords : *macroeconomics, RPJMD, development planning*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi makro ekonomi Kota Samarinda dan pengaruhnya terhadap target perencanaan pembangunan. Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan kinerja ekonomi dan sosial (makro ekonomi) di Kota Samarinda. Dimana tahun pertama pandemi laju pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda mengalami kontraksi, namun tahun kedua mampu menunjukkan perbaikan. Hal ini juga serupa dengan kondisi inflasi Kota Samarinda yang mencapai titik terendahnya pada awal tahun pandemi yang menandakan kelesuan daya beli masyarakat, namun menunjukkan peningkatan dalam level stabil pada tahun kedua pandemi. Hanya saja, pandemi berdampak cukup berat pada peningkatan kemiskinan dan pengangguran di Kota Samarinda. Faktor pemutusan hubungan kerja dan penurunan pendapatan masyarakat menjadi faktor utama. Masyarakat yang terdampak pandemi harus menjadi prioritas bagi pemerintah kota untuk dibantu dan diangkat derajat hidupnya melalui program kerja yang sesuai dan menjadi prioritas. Dari sisi perencanaan pembangunan jangka menengah

Dharma Yanti

daerah (yang dilihat dari RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021), pandemi menyebabkan beberapa target pembangunan tidak tercapai pada tahun 2020 dan 2021 seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Sementara capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Kata kunci : ekonomi makro, RPJMD, perencanaan pembangunan.

PENDAHULUAN

Salah satu situasi darurat terjadi di seluruh dunia, dimana saat ini satu dunia tengah berhadapan dengan serangan virus corona yang menyerang manusia melalui jalur pernafasannya. Virus yang mulanya tersebar di Wuhan, China kini telah melanda ke seluruh penjuru dunia. Cepatnya sebaran virus corona ini menjadi wabah atau yang dikenal dengan pandemi covid-19. Di Indonesia, pandemi mulai terjadi di awal tahun 2020, demikian pula di Kota Samarinda. Dikarenakan luasnya dan mudahnya penyebaran virus ini, pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang biasa disingkat PSBB. Tentunya kebijakan ini bermula dari arahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kemudian harus diterapkan dan didukung oleh pemerintah daerah se Indonesia.

Setiap kebijakan yang diambil tentunya akan memberikan banyak dampak, khususnya kebijakan PSBB ini memberikan dampak terutama pada aktivitas perekonomian masyarakat. Gejala kelangkaan akan barang-barang kebutuhan bidang kesehatan seperti *handsanitizer*, cairan pembasmi virus dan bakteri, masker, obat-obatan dan vitamin sempat terjadi selama beberapa waktu. Masyarakat seolah mengalami *panic buying*, sehingga harga barang-barang tersebut melonjak naik karena menjadi langka sementara permintaan konsumen melonjak tinggi. Namun yang menjadi sorotan adalah faktor keleluasaan dalam bekerja yang semula tidak dikekang oleh aturan kini semua aktivitas pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur atau protokol kesehatan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah, sesuai dengan tingkat keparahan penyebaran virus di daerah masing-masing. Hal ini berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat terutama pada sektor yang memerlukan mobilisasi seperti sektor transportasi dan pariwisata. Disamping itu, kelesuan konsumen juga terjadi karena masyarakat mengalami penurunan pendapatan.

Pemerintah sangat sadar dampak besar kebijakan PSBB ini akan menghantam perekonomian nasional hingga daerah-daerah. Hal ini dikarenakan selama pandemi, kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah sehingga kebijakan diambil berdasarkan hal tersebut. Namun pemerintah terus berupaya untuk menahan laju penurunan perekonomian secara nasional di seluruh Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan seperti kebijakan untuk tetap mendukung UKM di masa pandemi. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan amanat dari Peraturan Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan antara lain insentif pajak, subsidi bunga dan penjaminan modal kerja baru UMKM (Dirkareshza et al., 2021). Kemudian dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan banyaknya para pengusaha yang mengambil keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dalam rangka pengurangan karyawan demi menekan biaya kerugian dan operasional perusahaan (Juaningsih, 2020).

Dharma Yanti

Beberapa kebijakan menyebabkan konsekuensi besar terutama pada beberapa sektor ekonomi baik secara nasional, maupun di Kota Samarinda. Pertama kalinya Covid-19 terdeteksi di Kota Samarinda pada pertengahan bulan Maret 2020. Saat itu Gubernur Kalimantan Timur H. Isran Noor mengambil kebijakan isolasi terbatas untuk membendung laju penyebaran virus. Adapun kebijakan mitigasi bencana Covid-19 yang diambil oleh Pemerintah Kota Samarinda dijelaskan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020. Peraturan Walikota tersebut merupakan kebijakan operasional yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kebijakan umum yang menaunginya, yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (Apriani et al., 2021).

Penerapan kebijakan Pemerintah Kota Samarinda memberikan dampak besar terhadap kondisi makro ekonomi Kota Samarinda seperti kondisi laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan indeks pembangunan manusia. Hal ini tentunya akan berdampak pada capaian kinerja pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda, terutama menyusul adanya kebijakan refocusing anggaran untuk penanggulan Covid-19 di bidang kesehatan yang menyebabkan upaya pembangunan di sektor lain harus dikalahkan atau ditunda sementara waktu. Maka demikian, efek dari pandemi ini akan menggeser beberapa target pembangunan baik di dokumen perencanaan tahunan maupun perencanaan lima tahunan. Tentunya pemerintah akan berupaya untuk mengendalikan berbagai kebijakan di era *new normal* agar tidak menciptakan krisis berkepanjangan, dimana kebijakan ini tentunya akan berhubungan dengan rencana pembangunan jangka menengah (Muhyiddin, 2020). Maka selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut dampak pandemi terhadap kondisi makro ekonomi di Kota Samarinda serta perubahan beberapa target pembangunan pada perencanaan pembangunannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi dicerminkan melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto / Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB). Dimana, laju pertumbuhan PDB/PDRB yang digunakan diperoleh dari perhitungan PDB/PDRB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke-(n-1) (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke-(n-1), dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya (Badan Pusat Statistik, n.d.-a). Pertumbuhan ekonomi dianggap dapat menunjukkan kondisi ekonomi suatu negara/daerah selama periode tertentu (Wijanarko, n.d.).

Pengangguran

Pengangguran adalah suatu hal yang tidak dikehendaki, namun suatu penyakit yang terus menjalar di beberapa Negara, dikarenakan banyak faktor – faktor yang mempengaruhinya. Mengurangi jumlah angka pengangguran harus adanya kerjasama lembaga pendidikan, masyarakat, dan lain – lain. Berikut adalah beberapa faktor penyebab pengangguran yaitu sedikitnya lapangan kerja, kurangnya keahlian yang dimiliki para pencari kerja, kurangnya informasi lapangan pekerjaan, distribusi lapangan kerja tidak merata, belum optimalnya upaya pemerintah dalam melatih *softskill* pencari kerja, dan budaya malas. (Franita, 2016)

Kemiskinan

Kemiskinan setidaknya dapat dilihat dari dua sisi yaitu, *pertama* kemiskinan absolut (dimana pendekatan ini diidentifikasi dengan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. *Kedua*, kemiskinan relatif yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan. (Kuncoro, 2006)

Inflasi

Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus. Dari definisi tersebut ada tiga kriteria yang perlu diamati, untuk melihat telah terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga, bersifat umum, dan terjadi terus menerus dalam rentang waktu tertentu. Apabila terjadi kenaikan harga satu barang, yang tidak mempengaruhi harga barang lain, sehingga tidak naik secara umum, kejadian seperti itu bukanlah inflasi. Kecuali bila yang naik itu seperti harga BBM, ini berpengaruh terhadap harga-harga lainn sehingga secara umum semua produk hampir mengalami kenaikan harga. Bila kenaikan harga itu terjadinya sesaat kemudian turun lagi, itu pun belum bisa dikatakan inflasi, karena kenaikan harga yang diperhitungkan dalam konteks inflasi mempunyai rentang waktu minimal sebulan. (Murni, 2009)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; Pengetahuan, dan; Standar hidup layak. (*Badan Pusat Statistik*, n.d.-b)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. (Indonesia, 2017)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif terhadap publikasi data makro ekonomi dan dokumen perencanaan pembangunan di Kota Samarinda. Penulis mencoba melakukan analisis terhadap trend pada data makro ekonomi Kota Samarinda seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, tingkat inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2017-2021 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Serta analisis pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda tahun 2016-2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi makro ekonomi Kota Samarinda selama lima tahun terakhir dapat dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2017-2021

Indikator Makro Ekonomi	Sebelum Pandemi Covid-19			Saat Pandemi Covid-19	
	2017	2018	2019	2020	2021
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,85	4,96	5,00	-0,99	2,76
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,19	5,99	5,73	8,26	8,16
Tingkat Kemiskinan (%)	4,77	4,59	4,59	4,76	4,99
Inflasi (%)	3,69	3,32	1,49	0,86	2,05
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,46	79,93	80,20	80,11	80,76

Sumber : BPS Prov. Kaltim, 2022

Jika melihat kondisi makro ekonomi Kota Samarinda sebelum dan saat pandemi, terlihat bahwa pada awal pandemi mewabah di Kota Samarinda yakni tahun 2020, dilihat bahwa seluruh indikator makro ekonomi pada tahun tersebut menunjukkan kemerosotan atau penurunan. Namun di tahun kedua pandemi yang tengah masuk pada era *new normal*, dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah, perlahan kondisi makro ekonomi perlahan menunjukkan perbaikan dari beberapa sisi. Meski demikian, laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun 2020 ke 2021 menunjukkan peningkatan signifikan tapi tidak dibarengi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran hanya turun tipis. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Kurniawan, terjadi penurunan tingkat pendapat masyarakat selama pandemi, sedangkan jumlah atau biaya yang harus dikeluarkan cenderung tetap. Artinya pemasukan berkurang, namun pengeluaran tidak mengalami pengurangan (Kurniawan, 2021). Sementara itu garis kemiskinan, indeks kedalaman, dan indeks keparahan kemiskinan Kota Samarinda pada tahun 2021 mengalami kenaikan. Hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya kemiskinan.

Tingkat pengangguran Kota Samarinda pada tabel 1 di atas turun tipis, hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan pada awal pandemi, sehingga ketika ekonomi mulai membaik, sektor ekonomi menyerap tenaga kerja baik yang belum pernah bekerja dan tenaga kerja yang baru kehilangan pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia dimana laju pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran (Amalia, 2014).

Dharma Yanti

Sementara itu, dari sisi perencanaan jangka menengah daerah Kota Samarinda yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021, terlihat target perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah sebagai berikut :

Tabel 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021

Agenda Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	Target Akhir (2021)
MISI 1: PENINGKATAN TATA KOTA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK										
Peningkatan Tata Kota Kelola Pemerintahan Yang Baik	Tercapainya Reformasi Birokrasi	Terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi	Terwujudnya E-Government	20	25	25	35	40	45	45
			Indeks Kepuasan Masyarakat	77.2	78.2	78.2	80.6	84.0	84.8	84.8
			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan Perizinan	-	82	84	86	88	90	90
			Nilai LAKIP	CC	CC	B	BB	BB	A	A
			Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Berdasarkan LPPD	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
MISI 2: PENINGKATAN TATA KOTA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK										
Pemantapan Keuangan Daerah dan Pembiayaan Pembangunan Di Daerah	Terwujudnya pembiayaan pembangunan yang Akuntabel	Meningkatnya pendapatan & pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien & akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Peningkatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	18.03	18.03	19	20	25	30	30
			Persentase kesesuaian program/kegiatan APBD dengan RKPD	97,05% program, 54,20% kegiatan	97,05% program, 54,20% kegiatan	100% program, 100% kegiatan	100% program, 100% kegiatan	100% program, 100% kegiatan	100% program, 100% kegiatan	100%
MISI 3: PENINGKATAN TATA KOTA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK										
Optimalisasi Pengendalian Banjir	Mewujudkan Kota Samarinda bebas banjir	Terlaksananya pengendalian banjir & relokasi Tepi SKM	Relokasi Kawasan Kumuh Tepi SKM	0	0	1	1	2	2	6
			Pengamanan jalur hijau bantaran sungai	100	100	100	100	100	100	100
			titik lokasi banjir	45	40	36	32	26	17	17
Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur,	Menyediakan infrastruktur, fasilitas perkotaan	Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	65	70	75	80	90	90	90

Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Kondisi Makro Ekonomi dan
Target Perencanaan Pembangunan di Kota Samarinda

Dharma Yanti

Agenda Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	Target Akhir (2021)
Fasilitas Perkotaan dan Utilitas Penunjang Sektor Unggulan Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan	dan utilitas kota yang berkualitas dan efektif	kota	dalam Kondisi Baik							
			Indeks Gini	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29
			Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100	100	100	100	100	100	100
			Berkurangnya titik kemacetan	10	10	10	10	10	10	60
			Meningkatnya produktivitas pertanian	-	3	3	3	3	3	15
			Persentase kesesuaian guna lahan dengan RTRW	-	-	-	-	-	-	30
	Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas air bersih	Meningkatnya kapasitas & distribusi air bersih	Rasio rumah tangga pengguna air bersih	100	100	100	100	100	100	100
	Mewujudkan kota yang bersih dan bebas polusi sesuai baku mutu lingkungan	Tercapainya kebersihan, keindahan & kota ramah lingkungan (taman & RTH)	Persentase RTH	-	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10
			Adipura	70,90	71,30	71,70	72,10	72,50	72,90	72,90
			Indeks Pencemaran Udara	-	-	-	-	-	-	51-100%
			Pencemaran Sungai	≤ -31 Cemar berat	-11 s/d -30 cemar sedang	-11 s/d -30 cemar sedang	-11 s/d -30 cemar sedang	cemar ringan	cemar ringan	cemar ringan
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Secara Efektif	Mengurangi dampak resiko bencana	Meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana	Menurunnya jumlah kasus kebakaran	5	5	5	5	5	5	25
			Menurunnya jumlah kasus bencana lainnya	5	5	5	5	5	5	25
MISI 4: PENINGKATAN TATA KOTA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK										
Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	Meningkatkan peran investasi dan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional	Pertumbuhan Ekonomi	4,59	6 ± 1	6 ± 1	6 ± 1	6 ± 1	6 ± 1	6 ± 1
			Tingkat Inflasi	4,24	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata &	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per bulan	1.128.167	1.150.600	1.161.275	1.171.950	1.193.300	1.203.975	1.203.975

Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Kondisi Makro Ekonomi dan
Target Perencanaan Pembangunan di Kota Samarinda

Dharma Yanti

Agenda Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	Target Akhir (2021)
		Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya								
			Pendapatan Per Kapita	55,8	61,7	63,7	67,6	71,6	75,6	75,6
			Angka kemiskinan	4,56	4,22	4,00	3,86	3,76	3,67	3,67
			Angka Pengangguran	5,61	4,86	4,0-4,5	3,5-4,0	3,5-4,0	3,0-3,5	3,0-3,5
			Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	-	16,32	16,29	16,29	16,31	16,36	16,36
			kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	-	19,23	20,72	22,39	24,29	26,43	26,43
MISI 5: PENINGKATAN TATA KOTA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK										
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan secara berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat	Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba	Angka Harapan Hidup	73.63	73.66	73.73	73.76	73.80	73.87	73.87
			Kota Sehat Wistara	Wistara	Wistara	Wistara	Wistara	Wistara	Wistara	Wistara
			Cakupan Penemuan & Penanganan penderita penyakit TB	100	100	100	100	100	100	100
			Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	-	-	-	-	-	-	-
			Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar	75	75	80	90	95	100	100
			Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS	50	50	60	70	80	90	90
			Prevalensi Narkoba	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan Bidang Pendidikan Untuk Menghasilkan SDM Yang Profesional, Berkarakter dan Religius	Mewujudkan Pendidikan yang berkarakter, merata, dan terjangkau	Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas	Harapan Lama Sekolah	14,16	14,63	14,89	15,16	15,43	15,99	15,99
			Angka Melek Huruf	98,62	98,91	99,14	99,36	99,58	100	100
			IPM	78,39	78,47	78,82	79,17	79,53	80,34	80,34

Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Kondisi Makro Ekonomi dan
Target Perencanaan Pembangunan di Kota Samarinda

Dharma Yanti

Agenda Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	Target Akhir (2021)
			Rata-rata Lama Sekolah	10,26	10,47	10,54	10,65	10,70	11,21	11,21
			Persentase guru yang berkualifikasi S1/D4	81,69% (SD); 90,94% (SMP)	82,09% (SD); 91,39% (SMP)	82,50% (SD); 91,84% (SMP)	82,91% (SD); 92,29% (SMP)	83,32% (SD); 92,75% (SMP)	83,73% (SD); 93,21% (SMP)	83,73% (SD); 93,21% (SMP)
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100	100
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah	Persentase sekolah yang memiliki Sarpras dengan kondisi baik	100% (SD); 100% (SMP)	100% (SD); 100% (SMP)	100% (SD); 100% (SMP)	100% (SD); 100% (SMP)	100% (SD); 100% (SMP)	100% (SD); 100% (SMP)	100% (SD); 100% (SMP)
		Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren	Persentase santri dari keluarga tidak mampu yang memperoleh bantuan	0	10	10	10	10	10	50
MISI 6: PENINGKATAN TATA KOTA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK										
Peningkatan Kehidupan Beragama, Seni Budaya, Peran dan Prestasi Pemuda, Permasalahan Olah Raga Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan	Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya seni budaya, peran dan prestasi pemuda, masyarakatan olahraga, serta pemberdayaan masyarakat & perempuan	Terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, masyarakatan olah raga, pemberdayaan masyarakat & perempuan, dan sukses Keluarga Berencana	Jumlah Wirausahawan Muda	25	30	33	35	38	40	40
			Pertumbuhan penduduk	3,38	3,78	2,48	2,18	1,88	1,51	≤ 4
			Peserta KB	123.386	124.386	130.886	136.886	142.886	148.886	148.886
			Cakupan Fasilitasi Seni Budaya	57	65	70	80	90	100	100
		Tercapainya stabilitas keamanan & ketertiban serta iklim yang kondusif	Angka Kriminalitas	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Website Pemkot Samarinda (RPJMD • Perencanaan • • Kota Samarinda, n.d.), diambil tahun 2022

Apabila melihat target indikator tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang disusun oleh Pemerintah Kota Samarinda tahun 2016-2021, diketahui bahwa beberapa indikator makro ekonomi Kota Samarinda saat terjadi pandemi yakni tahun 2020 dan 2021 tidak mencapai target yang telah ditetapkan antaralain Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Namun terdapat indikator yang *over* target seperti inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan tingkat kemiskinan sedikit berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi makro ekonomi Kota Samarinda serta dikaitkan dengan targetnya pada RPJMD Kota Samarinda tahun 2016-2021 diuraikan sebagai berikut :

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Kota Samarinda cenderung menunjukkan trend yang meningkat selama beberapa tahun sebelum pandemi terjadi. Pada tahun 2017-2019, kenaikan pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda cukup konsisten. Namun pada tahun pertama pandemi Covid-19 terjadi (2020), laju pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda mengalami kontraksi sebesar negatif 0,99 persen. Dimana motor penggerak utama perekonomian di Kota Samarinda dilakukan oleh Lapangan Usaha Konstruksi dan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2020 tersebut mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -4,50 persen dan -3,82 persen. Hal ini tidak lepas dari pengaruh penerapan berbagai kebijakan pemerintah dalam menekan laju penyebaran virus yang memberikan dampak pada terhambatnya mobilisasi masyarakat yang berlaku di tempat kerja atau perusahaan yang beroperasi di seluruh Samarinda. Hal ini senada dengan penelitian lainnya yang menyebutkan penurunan kinerja ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemberlakuan PSBB, melemahnya daya konsumtif masyarakat, dan terjadinya PHK besar-besaran karena perusahaan mengalami kerugian di masa pandemi. (Akhmad, 2022). Adapun Lapangan Usaha Perdagangan (dari lapus yang memiliki dominasi besar terhadap perekonomian Kota Samarinda) yang mampu tumbuh positif, itupun tipis yakni sebesar 1,84 persen. Perdagangan dapat terus beroperasi baik secara *offline* maupun *online*, sehingga selama pandemi banyak pejual atau pedagang yang melakukan promosi dan berjualan secara *online*. Tidak hanya itu, sebagai jaring pengaman sosial pemerintah melakukan upaya untuk membantu UMKM dalam rangka menahan laju kelesuan ekonomi lebih lama dengan berbagai upaya promosi dan keringanan pembiayaan. Artinya dampak dari pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan kinerja ekonomi daerah. (Assidikiyah et al., 2021)

Namun dampak pandemi tidak menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi di Kota Samarinda, hal ini juga terjadi secara nasional dan banyak daerah lainnya di Indonesia. Berkat upaya pemerintah menangani situasi pandemi, geliat ekonomi mulai terlihat di tahun kedua pandemi di Kota Samarinda, dimana pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan menjadi sebesar 2,76 persen. Dengan situasi *new normal* penerapan protokol kesehatan berdampingan dengan aktifitas ekonomi seluruh lapisan masyarakat mulai terbiasa dilakukan. Hal inilah yang menjadikan geliat ekonomi semakin terasa di seluruh lapisan masyarakat.

Jika dilihat dari target laju pertumbuhan ekonomi pada RPJMD Kota Samarinda tahun 2016-2021, maka indikator pembangunan ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dan 2021. Sehingga saat dilakukan evaluasi penyelenggaraan RPJMD Kota Samarinda tahun ke empat dan kelima perlu untuk dijabarkan alasan yang logis tentang tidak tercapainya target ini.

Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Samarinda dari tahun 2017 hingga tahun 2019 menunjukkan persentase yang menurun. Namun, saat terjadi pandemi di awal tahun 2020 hingga saat ini mengganggu konsistensi penurunan tersebut. Dimana pada tahun 2020 TPT Kota Samarinda meningkat menjadi 8,26 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,73 persen. Peningkatan jumlah pengangguran ini terjadi disebabkan oleh terjadinya PHK atau pengurangan pekerja pada perusahaan yang diakibatkan oleh menurunnya pendapatan akibat kelesuan ekonomi yang terjadi. Sehingga untuk mengurangi biaya operasional, beberapa pengusaha atau perusahaan memilih untuk mengurangi jumlah pekerjanya. Hal ini senada dengan hasil penelitian lainnya yang menyebutkan penambahan jumlah pengangguran terbuka

Dharma Yanti

yang signifikan bukan hanya disebabkan oleh perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, yang menurut proyeksi *Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia akan berkisar -2% hingga 2% pada tahun ini, melainkan juga disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat terkait pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Menurut CORE, dampak pandemi COVID-19 terhadap hilangnya mata pencaharian di sektor informal perlu lebih diwaspadai. Pasalnya, daya tahan ekonomi para pekerja di sektor informal relatif rapuh, terutama yang bergantung pada penghasilan harian, mobilitas orang, dan aktivitas orang-orang yang bekerja di sektor formal (Mardiyah¹ & Nurwati, 2020). Hal ini juga akan berpotensi meningkatnya tingkat kemiskinan akibat pandemi.

Pada tahun kedua pandemi, tingkat pengangguran terbuka di Kota Samarinda hanya turun tipis. Hal ini perlu menjadi perhatian besar. Artinya kenaikan pengangguran yang terjadi sebelum pandemi tidak turun setengahnya. Disamping karena faktor demografi, lambatnya penurunan angka pengangguran ini menandakan semakin besarnya beban pembangunan yang harus diemban Kota Samarinda. Bahkan dari dokumen RPJMD Kota Samarinda tahun 2016-2021, tingkat pengangguran terbuka berada jauh dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dan 2021 dengan target masing-masing sebesar 3,5 – 4 persen dan 3 – 3,5 persen.

Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Samarinda pada tahun 2017-2019 cenderung mengalami penurunan. Namun saat terjadi pandemi, tingkat kemiskinan meningkat tipis dari 4,59 persen menjadi sebesar 4,76 persen dan 4,99 persen di tahun 2020 dan tahun 2021. Kenaikan tingkat kemiskinan ini tak lepas dari meningkatnya tingkat pengangguran di tahun terjadinya pandemi. Terutama terjadi pada para pekerja sektor informal yang memiliki penghasilan rendah. Maka dari itu, pemerintah mengupayakan bantuan keuangan dan sembako bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi. Namun hal ini tidak membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan, hal tersebut hanya membantu untuk mengurangi beban hidup masyarakat miskin sementara. Untuk itu dirasa perlu untuk pemerintah kota Samarinda mencari jalan keluar untuk meningkatkan derajat hidup mereka. Saat ini Pemerintah Kota Samarinda telah menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai program prioritas sebagai dampak luar biasa dari pandemi Covid-19 yang menekan dalam sektor sosial dan ekonomi masyarakat.

Target tingkat kemiskinan Kota Samarinda pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 pada periode tahun 2020 dan 2021 masih lebih rendah dibandingkan realisasinya. Artinya tingkat kemiskinan yang diharapkan belum tercapai sehingga diperlukan penjelasan lebih lanjut dalam penyusunan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan RPJMD Kota Samarinda tahun keempat dan tahun kelima. Program perlindungan sosial perlu menjadi *highlight* dalam dokumen perencanaan tahunan Kota Samarinda sebagai bentuk upaya keras Pemerintah Kota Samarinda dalam menahan laju kemiskinan.

Inflasi

Tingkat inflasi Kota Samarinda saat terjadi pandemi sangat mencerminkan kelesuan ekonomi kota ini. Pada tahun 2020, tingkat inflasi Kota Samarinda untuk pertama kali dalam lima tahun terakhir berada pada angka 0,86 persen. Rendahnya inflasi pada tahun pertama pandemi disebabkan minimnya permintaan dari konsumen dan rendahnya daya beli masyarakat akibat berkurangnya pendapatan, disamping itu terdapat pergeseran prioritas pembelian barang dan jasa. Namun pada tahun kedua pandemi yakni 2021, tingkat inflasi perlahan meningkat seiring dengan geliat ekonomi yang mulai membaik.

Target inflasi pada dokumen RPJMD Kota Samarinda tahun 2016-2021 mencatatkan kesenjangan hingga dua poin dengan realisasinya pada tahun 2020 dan 2021. Tetunya hal ini

Dharma Yanti

tidak lepas dari upaya Tim Pengendali Investasi Daerah yang terus bergerak dan memantau pergerakan indeks harga barang dan jasa yang dilakukan dengan strategi : 1) koordinasi dengan walikota; 2) penguatan sinergi/ koordinasi di internal TPID dan fungsi lembaga penyangga bahan pangan 3) pengembangan E-Pasar Tani, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kebijakan stabilisasi harga dapat dilaksanakan dan dipantau dengan lebih efektif.

Indeks Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia pada situasi pandemi pada tahun pertama menunjukkan penurunan angka indeks. Dimana pada tahun 2017-2019 IPM Kota Samarinda menunjukkan kenaikan secara perlahan. Namun pada tahun pertama pandemi harus mengalami penurunan sebesar 0,09 yakni dari 80,20 menjadi 80,11. Meskipun demikian IPM Kota Samarinda masih berada di atas target pembangunan pada RPJMD Kota Samarinda tahun 2016-2021. Kemudian, pada tahun kedua pandemi, IPM Kota Samarinda kembali meningkat bahkan lebih tinggi dari tahun 2018 yakni menjadi sebesar 80,76. Baiknya performa capaian pembangunan manusia di Kota Samarinda patut diapresiasi, hal ini menunjukkan kemudahan akses masyarakat Kota Samarinda terhadap pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan sebagainya.

Sejauh ini IPM Kota Samarinda telah berada dalam kategori atau kelompok sangat tinggi karena nilai IPM nya berada di atas 80. Serta merupakan IPM tertinggi di bandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur.

KESIMPULAN

Dampak pandemi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda mampu memukul perekonomian Kota Samarinda berkontraksi menjadi negatif 0,99 persen pada tahun 2020. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama, pada tahun kedua pandemi laju pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda mampu berangsur membaik menjadi sebesar 2,76 persen. Demikian pula dengan inflasi yang terjadi pada tahun 2020 mencapai angka terendahnya dalam lima tahun terakhir sebesar 0,86 persen yang menandakan lesunya daya beli masyarakat akibat pandemi. Namun di tahun kedua pandemi, tahun 2021 geliat ekonomi mulai terasa dimana inflasi menjadi stabil di angka 2,05 persen.

Selanjutnya dari indikator sosial, pandemi berdampak pada peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Samarinda. Hal ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah Kota Samarinda dengan memperkuat jaring pengaman sosial, terutama pada masyarakat yang terkena dampak pandemi seperti PHK, pengurangan pendapatan, kepala keluarga (menengah ke bawah) meninggal akibat covid-19, dan sebagainya.

Pandemi juga berdampak pada pengembangan upaya pembangunan manusia di Kota tepian ini, dimana pada tahun 2020 IPM Kota Samarinda mengalami penurunan untuk pertama kalinya menjadi sebesar 80,11 dari sebelumnya sebesar 80,20. Namun hal ini tidak berlangsung lama, pada tahun kedua pandemi IPM Kota Samarinda melesat naik menjadi sebesar 80,76 lebih tinggi bahkan sebelum terjadi pandemi.

Target indikator tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang disusun oleh Pemerintah Kota Samarinda tahun 2016-2021, diketahui bahwa beberapa indikator makro ekonomi Kota Samarinda saat terjadi pandemi yakni tahun 2020 dan 2021 tidak mencapai target yang telah ditetapkan antaralain Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Namun terdapat indikator yang *over* target seperti inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan tingkat kemiskinan sedikit berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Dharma Yanti

Rekomendasi/saran pada penelitian ini lebih ditujukan pada Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan penyesuaian target beberapa indikator makro ekonomi seperti laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka dengan menyusun dokumen perubahan RPJMD Kota Samarinda tahun 2016-2021 serta menyusun target makro ekonomi yang rasional disesuaikan dengan peluang dan tantangan ekonomi Kota Samarinda untuk dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dan lima tahunan. Untuk mendukung penurunan tingkat kemiskinan Kota Samarinda dan tingkat pengangguran terbuka, penulis merekomendasikan untuk memanfaatkan lembaga/badan zakat dan mencoba peluang industri halal di Kota Samarinda mengingat Kota Samarinda memiliki jumlah muslim terbanyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Daftar Pustaka

- Akhmad, T. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dan Solusi Mengatasinya. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 3(1), 67–77.
- Amalia, S. (2014). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap pengangguran terbuka dan kemiskinan di kota Samarinda. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 5(2), 173–182.
- Apriani, F., Saidi, A., Darmawan, A., & Rahman, R. A. (2021). MENSUKSESKAN MITIGASI BENCANA COVID-19: Analisis Kepercayaan Masyarakat pada Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda. *Journal of Policy & Bureaucracy Management*, 2(2), 115–128.
- Assidikiyah, N., Marseto, M., & Sishadiyati, S. (2021). Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur (Sebelum Dan Saat Terjadi Pandemi Covid-19). *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 102–115.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-a). Retrieved June 23, 2022, from <https://bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2022&Publikasi%5BkataKunci%5D=statistik+indonesia&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-b). Retrieved June 27, 2022, from <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Dirkareshza, R., Azura, D. M., & Pradana, R. (2021). Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat. *JURNAL MERCATORIA*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.5020>
- Franita, R. (2016). Analisa pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(3), 88–93.
- Indonesia, P. M. D. N. R. (2017). Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Dharma Yanti

Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Berita Negara Republik Indonesia Tahun.

Juaningsih, I. N. (2020). Analisis kebijakan PHK bagi para pekerja pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Adalah*, 4(1), 189–196.

Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). *Prosiding Seminar STIAMI*, 7(2), 98–103.

Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan: Teori. UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 4.*

Kurniawan, E. (2021). Penurunan Kesejahteraan Akibat Covid-19: Pengabdian Melalui Survey di Kota Samarinda (Indonesia). *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*, 1(2), 60–67.

Mardiyah¹, R. A., & Nurwati, R. N. (2020). *Dampak pandemi Covid-19 terhadap peningkatan angka pengangguran di Indonesia.*

Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>

Murni, A. (2009). *Ekonomi Makro, Refika Aditama. Bandung.*

RPJMD • Perencanaan • Kota Samarinda. (n.d.). Retrieved June 27, 2022, from <https://samarindakota.go.id/perencanaan/rpjmd>

wijanarko. (n.d.). *Pertumbuhan Ekonomi, Pengertian dan Pengukurannya.* Retrieved June 23, 2022, from <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/250-pertumbuhan-ekonomi-pengertian-dan-pengukurannya>